



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 September 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d 13.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Membahas RKA/KL Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam nota Keuangan RAPBN TA 2018
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah membahas RKA/KL Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam nota Keuangan RAPBN TA 2018.
3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	KEMENTERIAN/PROGRAM/UNIT KERJA	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2018	KEKURANGAN
	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	148.307.222.686	106.911.317.301	(41.395.905.385)
1	Sekretariat Jenderal	588.895.810	600.000.003	11.104.193
	(Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR)	295.531.661	301.104.193	5.572.531
	(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR)	293.364.149	298.895.810	5.531.661
2	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR)	111.297.610	104.974.960	(6.322.650)
3	Ditjen Bina Marga (Program Penyelenggaraan Jalan)	58.290.386.130	41.398.066.930	(16.892.319.200)
4	Ditjen Cipta Karya (Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman)	31.325.584.710	15.909.202.581	(15.416.382.129)
5	Ditjen Sumber Daya Air	45.913.464.153	37.309.551.551	(8.603.912.602)
	(Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	45.506.542.053	36.903.453.526	(8.603.088.527)
	(Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo)	406.922.100	406.098.025	(824.075)
6	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (Program Pengembangan Perumahan)	10.055.426.330	9.633.756.042	(421.670.288)
7	Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan (Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan)	259.090.270	261.638.463	2.548.193
8	Badan Penelitian Dan Pengembangan (Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR)	654.299.010	611.986.939	(42.312.071)
9	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Program Pembinaan Konstruksi)	341.364.610	338.716.396	(2.648.214)
10	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah)	272.349.680	248.359.063	(23.990.617)
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia)	495.064.373	495.064.373	0

2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten/kota tertentu, akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.05 WIB.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASOEKI HADIMOELJONO

Jakarta, 7 September 2017

KETUA RAPAT,



FARY DJEMY FRANCIS